Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

BAHASA, MAKNA, DAN TINDAKAN: PRAGMATISME PEIRCE, JAMES, DAN DEWEY DI ERA PASCAKEBENARAN

Muh Agung Sabriah[1], St. Nurhayati[2]
[1,2]Institut Agama Islam Negeri Parepare
[1]muhagungs13316@gmail.com, [2]hjstnurhayati@iainpare.ac.id

ABSTRACT

The post-truth era is characterized by the declining influence of objective facts relative to emotion and personal belief in shaping public opinion. In Indonesia, this is evident in the 12,547 hoax issues handled by the Ministry of Communication and Informatics between August 2018 and December 2023. Literature on hoaxes and disinformation is dominated by communication, psychology, and legal studies focusing on the spread, detection, and regulation of content, while studies of pragmatism tend to be exegetical and rarely connect the pragmatic theory of meaning to the crisis of public communication. This article reconstructs the concepts of language, meaning, and action in the thought of Charles S. Peirce, William James, and John Dewey, and uses them as a framework for reading the crisis of meaning in the post-truth era. This qualitative library research employs a hermeneutic approach and comparative-conceptual analysis of the three thinkers' primary texts. The analysis shows three patterns: Peirce treats meaning as a habit of action tested by a community of inquirers; James as consequences in concrete experience; and Dewey as the outcome of communication and social inquiry. The article argues that the post-truth crisis is not merely an information crisis but a crisis in the practice of fixing belief, that is, when meaning is no longer tested through public consequences but locked in by the methods of tenacity and authority. Therefore, the pragmatism of Peirce and Dewey offers stronger normative criteria than the popular reading of James for formulating inquiry-based digital literacy.

Keywords: *Meaning and action, pragmatism, post-truth*

ABSTRAK

Era pascakebenaran ditandai oleh melemahnya pengaruh fakta objektif dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik. Di Indonesia, gejala ini tampak dari 12.547 isu hoaks yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang Agustus 2018 hingga Desember 2023, di tengah 229,43 juta pengguna internet pada 2025. Literatur tentang hoaks dan disinformasi umumnya didominasi kajian komunikasi, psikologi, dan hukum yang memusatkan perhatian pada penyebaran, deteksi, dan regulasi konten. Sementara itu, kajian filsafat pragmatisme cenderung bersifat eksegetis terhadap tokoh atau diarahkan pada filsafat pendidikan, sehingga jarang menautkan teori makna pragmatis dengan krisis komunikasi publik. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep bahasa, makna, dan tindakan dalam pemikiran Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey, lalu menggunakannya sebagai kerangka untuk membaca krisis makna di era pascakebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan hermeneutis dan analisis konseptual-komparatif atas teks primer ketiga tokoh. Data berupa teks utama yang dianalisis

melalui visualisasi data, penceritaan ulang, deskripsi, dan interpretasi. Hasil analisis menunjukkan tiga pola: Peirce menempatkan makna sebagai kebiasaan tindakan yang diuji komunitas penyelidik; James menempatkan makna sebagai konsekuensi dalam pengalaman konkret; Dewey menempatkan makna sebagai hasil komunikasi dan inkuiri sosial. Argumen artikel ini ialah bahwa krisis pascakebenaran bukan semata krisis informasi, melainkan krisis praktik penetapan keyakinan, yakni ketika makna tidak lagi diuji melalui konsekuensi publik, tetapi dikunci oleh metode keteguhan dan otoritas. Karena itu, pragmatisme Peirce dan Dewey menawarkan kriteria normatif yang lebih kuat daripada tafsir populer atas James untuk merumuskan literasi digital berbasis inkuiri.

Kata Kunci: makna dan tindakan, pragmatisme, pascakebenaran

A. Pendahuluan

Krisis makna di ruang publik digital telah menjadi persoalan krusial bagi masyarakat Indonesia. Gejala ini penting karena makna kata-kata publik, seperti "fakta", "vaksin", atau "kecurangan", tidak lagi ditentukan oleh pengujian bersama, tetapi oleh afiliasi emosional dan kelompok. Oxford Dictionaries menetapkan *post-truth* sebagai kata tahun 2016 dan mendefinisikannya sebagai keadaan ketika fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan seruan emosi dan keyakinan pribadi; penggunaannya melonjak sekitar 2.000 persen dibanding tahun sebelumnya (Oxford Dictionaries, 2016; CNBC, 2016). Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani 12.547 isu hoaks sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, dengan isu kesehatan (2.357) dan politik (1.628) di antara kategori terbesar (Good News From Indonesia, 2024). Skala paparannya besar: APJII mencatat 229,43 juta pengguna internet pada 2025, atau penetrasi 80,66 persen (Bisnis.com, 2025). Dengan demikian, krisis pascakebenaran adalah krisis cara masyarakat memberi makna pada bahasa, bukan sekadar persoalan teknis informasi.

Penelitian terdahulu telah membahas fenomena ini dari berbagai sudut, tetapi jarang dari filsafat bahasa pragmatis. Kecenderungan ini terjadi karena disinformasi umumnya dipandang sebagai masalah empiris yang dapat diukur dan diatur. Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan luas daripada berita benar di Twitter; Lewandowsky, Ecker, dan Cook (2017) menjelaskan mekanisme kognitif yang membuat koreksi sering

gagal; Wardle dan Derakhshan (2017) memetakan "gangguan informasi" menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Di sisi filsafat, McIntyre (2018) dan Frankfurt (2005) membahas pascakebenaran dan *bullshit* sebagai pengabaian terhadap kebenaran, sedangkan kajian pragmatisme seperti Misak (2013) dan Hookway (2000) berfokus pada rekonstruksi teori kebenaran dan inkuiri. Namun, belum banyak tulisan yang secara khusus menautkan teori makna Peirce, James, dan Dewey dengan krisis komunikasi publik di Indonesia. Celah inilah yang menjadi alasan kehadiran artikel ini.

Artikel ini merespons celah tersebut dengan merekonstruksi relasi bahasa, makna, dan tindakan dalam pragmatisme klasik dan mengujinya sebagai kerangka membaca era pascakebenaran. Pilihan ini didasari pertimbangan bahwa pragmatisme sejak awal lahir sebagai teori tentang bagaimana keyakinan ditetapkan dan diuji melalui tindakan. Secara khusus, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana Peirce, James, dan Dewey masing-masing merumuskan makna dalam kaitannya dengan tindakan? Kedua, apa titik temu dan perbedaan ketiganya dalam menentukan kriteria makna yang sah? Ketiga, kerangka mana yang paling memadai untuk menjelaskan dan merespons krisis makna di ruang publik digital? Pertanyaan pertama dijawab di bagian hasil, sedangkan pertanyaan kedua dan ketiga dijawab di bagian pembahasan. Dengan cara ini, artikel ini tidak berhenti pada eksegesis tokoh, tetapi menggunakan teks klasik untuk memahami persoalan sosial kontemporer.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa krisis pascakebenaran merupakan krisis praktik penetapan keyakinan, dan pragmatisme menyediakan diagnosis sekaligus kriteria normatif untuk mengatasinya. Argumen ini bertumpu pada hubungan sebab-akibat yang diuji dalam tulisan: ketika makna dilepaskan dari konsekuensi publik yang dapat diuji, keyakinan akan ditetapkan melalui metode keteguhan dan otoritas, yang pada gilirannya melahirkan polarisasi. Peirce telah mengidentifikasi metode-metode itu sebagai cara menetapkan keyakinan yang gagal dikoreksi oleh realitas (Peirce, 1877). Dewey menambahkan bahwa publik gagal mengenali dirinya ketika saluran komunikasi terhambat (Dewey, 1927). Sebaliknya, tafsir populer atas James,

bahwa yang benar adalah yang "berguna", justru berisiko membenarkan logika pascakebenaran bila dilepaskan dari syarat verifikasi. Hipotesisnya, semakin makna dikaitkan dengan konsekuensi yang dapat diuji bersama, semakin kecil ruang bagi disinformasi untuk menetap sebagai keyakinan publik.

Kajian Teori

Kajian tentang hubungan bahasa, makna, dan tindakan dalam pragmatisme dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan besar. Pemetaan ini perlu karena literatur pragmatisme sangat luas dan sering tumpang-tindih dengan filsafat analitik, teori kritis, dan studi komunikasi. Kecenderungan pertama adalah kajian historis-eksegetis yang merekonstruksi pemikiran para pendiri pragmatisme dalam konteks zamannya. Kecenderungan kedua adalah kajian transformatif yang mewarisi gagasan pragmatis ke dalam filsafat bahasa kontemporer, seperti teori tindak tutur, inferensialisme, dan etika diskursus. Kecenderungan ketiga adalah kajian empiris dan kritis tentang pascakebenaran dan disinformasi, yang umumnya berasal dari ilmu komunikasi, psikologi kognitif, dan filsafat sosial. Ketiga kecenderungan ini jarang bertemu: yang pertama dan kedua berbicara tentang makna tanpa menyentuh krisis publik, sedangkan yang ketiga berbicara tentang krisis publik tanpa teori makna yang eksplisit. Peta ini menjadi dasar untuk menunjukkan posisi artikel ini.

Kecenderungan pertama memusatkan perhatian pada rekonstruksi teks dan biografi intelektual para pendiri pragmatisme. Orientasi ini didorong oleh kebutuhan meluruskan salah tafsir, terutama anggapan bahwa pragmatisme hanyalah filsafat "asal berguna". Menand (2001) merekonstruksi lahirnya *Metaphysical Club* sebagai respons atas trauma Perang Saudara Amerika, sehingga pragmatisme dibaca sebagai filsafat yang curiga pada kepastian absolut. Hookway (2000) dan Misak (2013) menekankan perbedaan tajam antara pragmatisme Peirce yang realis dan berorientasi pada komunitas penyelidik dengan pragmatisme James yang lebih psikologis dan individual. Bernstein (2010) memperlihatkan bahwa tema-tema pragmatis, seperti antifondasionalisme dan fallibilisme,

kembali menguat dalam filsafat akhir abad ke-20. Kajian ini berjasa memperjelas peta konsep, tetapi umumnya berhenti pada tataran tekstual dan historis. Akibatnya, relevansi teori makna pragmatis bagi persoalan komunikasi publik kontemporer jarang dielaborasi secara sistematis.

Kecenderungan kedua membaca pragmatisme sebagai pendahulu "pembalikan pragmatis" dalam filsafat bahasa. Kecenderungan ini muncul karena filsafat analitik pasca-Wittgenstein semakin memandang makna sebagai penggunaan dan praktik, bukan representasi. Rorty (1979) memanfaatkan Dewey untuk membongkar paradigma pikiran sebagai "cermin alam". Putnam (1995) menghidupkan kembali pragmatisme James dan Dewey untuk menolak dikotomi fakta dan nilai. Brandom (1994) merumuskan semantik inferensialis yang memandang makna kalimat sebagai peran dalam praktik memberi dan meminta alasan. Habermas mentransformasikan gagasan komunitas penyelidik Peirce menjadi teori tindakan komunikatif, sementara Austin dan Wittgenstein, meski tidak menyebut diri pragmatis, menunjukkan bahwa ujaran adalah bentuk tindakan (Habermas, 1984; Austin, 1962; Wittgenstein, 1953). Kajian ini memperkaya teori makna, tetapi fokusnya pada kondisi ideal komunikasi rasional. Kondisi nyata ruang publik yang dipenuhi disinformasi jarang menjadi titik tolaknya.

Kecenderungan ketiga meneliti pascakebenaran sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dan diukur. Kecenderungan ini menguat setelah 2016, ketika Brexit dan pemilu Amerika Serikat memperlihatkan dampak politik disinformasi. Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menemukan bahwa kabar palsu menyebar lebih cepat dan luas daripada kabar benar, sedangkan Lewandowsky, Ecker, dan Cook (2017) menjelaskan mengapa koreksi fakta sering gagal mengubah keyakinan. Wardle dan Derakhshan (2017) menyusun tipologi gangguan informasi, sedangkan Pariser (2011) dan Sunstein (2017) menunjukkan bagaimana algoritma dan ruang gema mempersempit paparan terhadap pandangan berbeda. Secara filosofis, McIntyre (2018) menelusuri akar pascakebenaran pada bias kognitif dan relativisme, sementara Frankfurt

(2005) membedakan pembohong dari pembual yang sama sekali tidak peduli pada kebenaran. Kajian ini kuat secara empiris dan diagnostik. Namun, ia jarang menyediakan teori makna yang menjelaskan mengapa kata-kata publik kehilangan daya ikatnya.

Ketiga kecenderungan tersebut belum memperhatikan hubungan langsung antara teori makna pragmatis dan krisis penetapan keyakinan di ruang publik digital. Kekurangan ini terjadi karena masing-masing kecenderungan bekerja dalam disiplin dan pertanyaan yang berbeda. Kajian historis-eksegetis memahami Peirce, James, dan Dewey secara mendalam tetapi tidak membawanya ke persoalan aktual. Kajian transformatif mengembangkan teori makna sebagai praktik, tetapi berangkat dari model komunikasi yang ideal. Kajian pascakebenaran menggambarkan krisis secara rinci, tetapi memperlakukan makna sebagai sesuatu yang sudah jelas dan hanya perlu "dibenarkan" melalui koreksi fakta. Di Indonesia, persoalan ini makin terasa karena penanganan hoaks cenderung diarahkan pada pemblokiran konten dan penegakan hukum. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk kajian yang menautkan bagaimana makna terbentuk melalui tindakan dengan bagaimana makna itu runtuh dalam praktik komunikasi digital.

Artikel ini merumuskan arah baru dengan membaca krisis pascakebenaran melalui lensa teori makna pragmatis Peirce, James, dan Dewey secara komparatif. Perspektif ini dipilih karena pragmatisme memandang makna, keyakinan, dan tindakan sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan. Jika makna adalah kebiasaan tindakan (Peirce), konsekuensi dalam pengalaman (James), dan hasil komunikasi bersama (Dewey), maka krisis makna dapat dipahami sebagai rusaknya rangkaian tersebut. Talisse (2005) telah menunjukkan bahwa pragmatisme Peirce dapat menjadi dasar epistemik bagi demokrasi deliberatif, tetapi belum mengaitkannya dengan perbandingan ketiga tokoh klasik dan konteks disinformasi. Artikel ini bergerak satu langkah lebih jauh dengan mengevaluasi kriteria makna mana yang paling tahan terhadap logika pascakebenaran. Fokusnya bukan pada data penyebaran hoaks, melainkan pada struktur konseptual

yang memungkinkan atau mencegah hoaks menetap sebagai keyakinan. Arah ini sekaligus menjadi dasar desain metode pada bagian berikutnya.

B. Metode Penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah artefak tekstual, yaitu konsep bahasa, makna, dan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam karya Peirce, James, dan Dewey. Pemilihan artefak tekstual didasarkan pada sifat penelitian filsafat yang objek materialnya berupa gagasan yang terdokumentasi dalam teks. Konsep yang dianalisis mencakup maksim pragmatik, kebiasaan (*habit*), dan interpretan pada Peirce; *cash value*, verifikasi, dan kehendak untuk percaya pada James; serta komunikasi, inkuiri, dan *warranted assertibility* pada Dewey. Fenomena pascakebenaran di Indonesia tidak diperlakukan sebagai objek pengukuran empiris, melainkan sebagai konteks problematis yang menguji daya jelas konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, objek formal penelitian ini adalah relasi makna dan tindakan, objek materialnya adalah teks pragmatisme klasik, dan konteksnya adalah krisis komunikasi publik di era pascakebenaran.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam tradisi filsafat (Zed, 2004). Desain kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan menafsirkan makna konsep, bukan mengukur frekuensi atau hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika filosofis, yang membaca teks dalam lingkaran antara bagian dan keseluruhan, antara konteks historis penulis dan horizon persoalan pembaca masa kini. Pendekatan ini dilengkapi analisis konseptual-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan struktur argumen ketiga tokoh (Bakker & Zubair, 1990; Kaelan, 2005). Desain ini memungkinkan penelitian bergerak dari pemahaman teks (apa yang dikatakan tokoh), ke perbandingan (bagaimana posisi mereka saling terkait), dan akhirnya ke aplikasi kritis (apa artinya bagi persoalan pascakebenaran). Ketiga langkah tersebut menentukan susunan bagian hasil dan pembahasan.

Data penelitian berasal dari teks, yang dibagi menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan data kontekstual. Pembagian ini penting untuk menjaga ketepatan tafsir dan membedakan suara tokoh dari suara penafsirnya. Sumber primer meliputi esai Peirce "The Fixation of Belief" (1877), "How to Make Our Ideas Clear" (1878), "What Pragmatism Is" (1905), dan *Collected Papers* (1931–1958); karya James "The Will to Believe" (1896), *Pragmatism* (1907), dan *The Meaning of Truth* (1909); serta karya Dewey *Democracy and Education* (1916), *Experience and Nature* (1925), *The Public and Its Problems* (1927), dan *Logic: The Theory of Inquiry* (1938). Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang pragmatisme, filsafat bahasa, dan pascakebenaran. Data kontekstual berupa laporan dan berita daring tentang hoaks dan penggunaan internet di Indonesia, yang dipakai untuk merumuskan fakta sosial.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan pembacaan dekat (*close reading*) terhadap teks primer dan sekunder. Teknik ini sesuai karena seluruh data berupa dokumen tertulis yang dapat dibaca berulang untuk memastikan ketepatan kutipan dan konteksnya. Prosesnya berlangsung dalam tiga langkah. Pertama, inventarisasi teks primer yang memuat rumusan eksplisit tentang makna, keyakinan, kebenaran, dan bahasa. Kedua, pencatatan kutipan kunci beserta lokasi teksnya, misalnya nomor paragraf *Collected Papers* untuk Peirce atau judul kuliah untuk James. Ketiga, penelusuran literatur sekunder melalui katalog perpustakaan dan basis data jurnal untuk memetakan tafsir yang sudah ada. Data kontekstual dikumpulkan dari rilis dan pemberitaan yang memuat angka resmi, seperti data Kementerian Komunikasi dan Informatika dan survei APJII. Semua data dicatat dalam matriks kutipan yang menjadi dasar visualisasi data pada bagian hasil.

Analisis data dilakukan dalam empat langkah yang sejalan dengan struktur bagian hasil: (1) visualisasi data dalam bentuk tabel ringkasan rumusan para pemikir; (2) *restatement*, yakni penceritaan ulang isi data agar mudah dipahami; (3) deskripsi, yakni penunjukan pola atau kecenderungan yang disimpulkan menjadi tiga hal penting; dan (4)

interpretasi, yakni penggalian makna, implikasi, serta hubungan sebab akibat. Tahapan ini dipilih agar tafsir tidak melompat langsung ke penilaian sebelum isi teks dipahami secara utuh. Tahap refleksi kritis kemudian membandingkan ketiga pola, mengujinya terhadap konteks pascakebenaran, dan menilai kekuatan serta kelemahannya dengan merujuk pada literatur sekunder. Validitas tafsir dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan bacaan peneliti dengan tafsir para ahli seperti Misak (2013), Hookway (2000), dan Bernstein (2010). Sebagai catatan, terjemahan dan parafrasa dilakukan oleh penulis, sehingga formulasi persis suatu gagasan perlu dirujuk pada edisi aslinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peirce: Makna sebagai Kebiasaan Tindakan yang Diuji Komunitas

Tabel 1 Rumusan Kunci Peirce tentang Makna, Keyakinan, dan Tindakan

Teks dan lokasi	Kutipan atau rumusan kunci	Konsep
"The Fixation of Belief" (1877)	Empat metode menetapkan keyakinan: keteguhan (*tenacity*), otoritas, *a priori*, dan sains.	Penetapan keyakinan
"How to Make Our Ideas Clear" (1878), CP 5.398	*"The essence of belief is the establishment of a habit."*	Keyakinan sebagai kebiasaan
"How to Make Our Ideas Clear" (1878), CP 5.402	*"Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object."*	Maksim pragmatik
"How to Make Our Ideas Clear" (1878), CP 5.407	*"The opinion which is fated to be ultimately agreed to by all who investigate, is what we mean by the truth."*	Kebenaran sebagai konvergensi inkuiri
Tulisan pragmatisisme (1905–1907), CP 5.491	Penjelasan terbaik atas sebuah konsep adalah deskripsi tentang kebiasaan yang hendak dihasilkannya.	Interpretan akhir sebagai kebiasaan

Sumber: diolah penulis dari Peirce (1877, 1878, 1905, 1931–1958).

Tabel 1 memuat lima rumusan Peirce yang tersebar dari 1877 hingga awal 1900-an. Dalam bahasa sederhana, Peirce mengatakan bahwa kita memahami arti sebuah kata ketika kita tahu apa yang akan terjadi jika kita bertindak berdasarkan kata itu (Peirce, 1878). Kata "keras" pada berlian, misalnya, berarti berlian tidak akan tergores oleh banyak benda lain. Keyakinan, bagi Peirce, bukan perasaan yakin di dalam kepala, melainkan kesiapan untuk bertindak dengan cara tertentu. Peirce

juga membedakan empat cara orang menetapkan keyakinan: berpegang teguh pada apa yang sudah dipercaya, mengikuti otoritas, memilih yang terasa masuk akal, atau menguji melalui metode ilmiah (Peirce, 1877). Kebenaran, menurutnya, adalah pendapat yang pada akhirnya akan disepakati oleh semua orang yang menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, makna dan kebenaran selalu terkait dengan tindakan dan pengujian bersama.

Tiga hal penting dapat disimpulkan dari Tabel 1. Pertama, makna bersifat *kondisional dan prospektif*: makna sebuah konsep dirumuskan dalam bentuk "jika melakukan X, maka akan terjadi Y", sehingga selalu menunjuk ke konsekuensi di masa depan. Kedua, makna bersifat *umum dan publik*: yang dimaksud efek praktis bukanlah pengalaman pribadi seseorang, melainkan efek yang dapat dibayangkan dan diuji oleh siapa pun. Ketiga, makna bersifat *korektif*: dari empat metode penetapan keyakinan, hanya metode ilmiah yang memungkinkan keyakinan dikoreksi oleh realitas di luar kehendak kita, sedangkan metode keteguhan dan otoritas justru menutup diri dari koreksi. Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa Peirce membangun teori makna yang menempatkan komunitas penyelidik, bukan individu, sebagai penentu akhir makna yang sah.

Temuan tersebut bermakna bahwa hoaks yang terus dipercaya bukan sekadar informasi keliru, melainkan kebiasaan tindakan yang sudah tertanam, misalnya menolak vaksin atau mencurigai lembaga pemilu. Inilah sebabnya koreksi fakta sering gagal: koreksi menyasar informasi, sementara masalahnya terletak pada kebiasaan. Lebih jauh, metode keteguhan dan otoritas yang dikritik Peirce pada 1877 menemukan bentuk barunya dalam ruang gema media sosial, ketika orang hanya menerima kabar dari kelompok dan tokoh yang sudah ia percayai (Sunstein, 2017). Sebab-akibatnya jelas: ketika keyakinan ditetapkan tanpa pengujian publik, makna kata-kata publik terpecah sesuai kelompok. Dengan demikian, Peirce menyediakan diagnosis bahwa krisis pascakebenaran adalah kemunduran dari metode ilmiah ke metode keteguhan dan otoritas.

James: Makna sebagai Konsekuensi dalam Pengalaman Konkret

Tabel 2 Rumusan Kunci James tentang Makna dan Kebenaran

Teks dan lokasi	Kutipan atau rumusan kunci	Konsep
Pragmatism, kuliah II (1907)	Setiap kata harus dikeluarkan *"practical cash-value"*-nya dan dipekerjakan *"within the stream of your experience"*.	Nilai tunai makna
Pragmatism, kuliah VI (1907)	*"True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate and verify."*	Kebenaran sebagai verifikasi
Pragmatism, kuliah VI (1907)	*"The true ... is only the expedient in the way of our thinking."*	Kebenaran sebagai kebergunaan
"The Will to Believe" (1896)	Kepercayaan pada suatu fakta dapat membantu menciptakan fakta itu.	Daya performatif keyakinan
The Meaning of Truth (1909)	Kebenaran sebagai relasi kesesuaian yang diverifikasi dalam pengalaman, sebagai jawaban atas para pengkritik.	Pembelaan teori kebenaran

Sumber: diolah penulis dari James (1896, 1907, 1909).

Tabel 2 memperlihatkan bagaimana James menafsirkan ulang maksim Peirce untuk khalayak yang lebih luas. Secara sederhana, James mengatakan bahwa setiap kata harus diuji dengan bertanya: apa bedanya dalam hidup saya jika kata ini benar atau salah? Jika tidak ada bedanya, perdebatan tentang kata itu kosong. Ide yang benar, menurut James, adalah ide yang dapat kita uji dan buktikan dalam pengalaman. Namun, ia juga menulis bahwa yang benar adalah yang "berguna" bagi cara berpikir kita, rumusan yang kemudian banyak disalahpahami (James, 1907). Dalam "The Will to Believe", James menambahkan bahwa ada situasi ketika kepercayaan kita sendiri ikut menciptakan kenyataan, misalnya dalam persahabatan (James, 1896). Dalam *The Meaning of Truth*, James membela diri bahwa "berguna" yang ia maksud tetap mensyaratkan kesesuaian dengan fakta (James, 1909).

Tiga hal penting dapat disimpulkan dari Tabel 2. Pertama, James menggeser makna dari ranah *logis-umum* ke ranah *psikologis-partikular*: ukuran makna adalah perbedaan konkret dalam aliran pengalaman individu, bukan efek umum yang dapat dibayangkan. Kedua, James menempatkan kebenaran sebagai *peristiwa*: ide menjadi benar melalui proses verifikasi, bukan sifat yang sudah melekat. Ketiga, terdapat *ketegangan internal* dalam rumusan James antara kebenaran sebagai verifikasi dan kebenaran sebagai kebergunaan.

Rumusan pertama dekat dengan Peirce, sedangkan rumusan kedua membuka tafsir subjektivis. Ketegangan ini menjelaskan mengapa Russell dan Moore pada masanya menuduh James mengacaukan "benar" dengan "memuaskan", dan mengapa Peirce mengganti nama doktrinnya menjadi pragmatisisme (Misak, 2013; Peirce, 1905).

Temuan ini bermakna ganda bagi era pascakebenaran. Di satu sisi, James memberikan alat untuk memahami mengapa orang mempertahankan hoaks: kabar palsu sering "berguna" secara psikologis karena menenangkan, menegaskan identitas kelompok, atau memberi penjelasan sederhana atas keadaan yang rumit. Di sisi lain, jika rumusan "yang benar adalah yang berguna" dilepaskan dari syarat verifikasi, rumusan itu justru menjadi pembenaran filosofis bagi logika pascakebenaran, yaitu keyakinan dinilai dari kenyamanannya, bukan dari kesesuaiannya dengan kenyataan. Gagasan "kehendak untuk percaya" juga dapat disalahgunakan untuk membenarkan kepercayaan tanpa bukti. Dengan demikian, James menjelaskan *mengapa* hoaks menarik, tetapi tafsir populernya kurang memadai sebagai kriteria untuk *menolak* hoaks.

Dewey: Makna sebagai Hasil Komunikasi dan Inkuiri Sosial

Tabel 3 Rumusan Kunci Dewey tentang Bahasa, Makna, dan Komunikasi

Teks dan lokasi	Kutipan atau rumusan kunci	Konsep
Experience and Nature, bab 5 (1925)	*"Of all affairs, communication is the most wonderful."*	Keutamaan komunikasi
Experience and Nature, bab 5 (1925)	Makna *"is primarily a property of behavior"*, yaitu perilaku bersama.	Makna sebagai sifat perilaku bersama
Democracy and Education, bab 7 (1916)	Demokrasi *"is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience"*.	Demokrasi sebagai komunikasi
The Public and Its Problems (1927)	Selama Masyarakat Besar belum menjadi Komunitas Besar, publik akan tetap *"in eclipse"*.	Gerhana publik
Logic: The Theory of Inquiry (1938)	Kebenaran diganti dengan *warranted assertibility*, klaim yang dibenarkan oleh inkuiri.	Inkuiri dan fallibilisme

Sumber: diolah penulis dari Dewey (1916, 1925, 1927, 1938).

Tabel 3 merangkum bagaimana Dewey menempatkan bahasa dalam kehidupan sosial. Secara sederhana, Dewey mengatakan bahwa makna tidak lahir di dalam kepala seseorang, tetapi dari kegiatan bersama, ketika

orang saling memahami untuk melakukan sesuatu bersama. Contohnya, ketika seseorang menunjuk bunga dan meminta temannya mengambilkannya, isyarat itu bermakna karena keduanya terlibat dalam proyek yang sama (Dewey, 1925). Karena makna lahir dari komunikasi, Dewey memandang demokrasi bukan hanya sistem pemilu, tetapi cara hidup bersama yang ditopang oleh pertukaran pengalaman (Dewey, 1916). Dewey juga mengingatkan bahwa masyarakat modern dapat kehilangan kemampuan mengenali kepentingan bersamanya bila komunikasinya terganggu (Dewey, 1927). Untuk menilai klaim, Dewey memakai istilah "ketegasan yang terjamin", yakni klaim yang telah lolos penyelidikan tetapi tetap terbuka untuk direvisi (Dewey, 1938).

Tiga hal penting dapat disimpulkan dari Tabel 3. Pertama, makna bersifat *sosial-konstitutif*: makna tidak hanya diekspresikan melalui komunikasi, tetapi diciptakan olehnya, sehingga kualitas makna bergantung pada kualitas komunikasi. Kedua, makna bersifat *instrumental-problematis*: bahasa adalah alat untuk menyelesaikan situasi yang tidak menentu melalui inkuiri, dan klaim dinilai dari keberhasilannya dalam proses tersebut. Ketiga, makna bersifat *politis*: kegagalan komunikasi bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan publik untuk membentuk dirinya sebagai komunitas demokratis. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa Dewey memadukan orientasi komunal Peirce dan orientasi pengalaman James, lalu membawanya ke ranah politik dan pendidikan.

Temuan ini menjadikan Dewey kerangka yang paling langsung untuk membaca krisis komunikasi digital. Diagnosis "gerhana publik" Dewey pada 1927 dapat dibaca ulang dalam konteks ruang publik digital: masyarakat memiliki saluran komunikasi yang belum pernah sebesar ini, tetapi saluran itu terfragmentasi ke dalam kelompok yang tidak saling menguji klaim. Sebab-akibatnya, ketika komunikasi kehilangan dimensi inkuiri bersama, makna kata-kata publik tidak lagi menjadi milik bersama, melainkan menjadi penanda identitas kelompok. Implikasinya, penanganan hoaks tidak cukup melalui pemblokiran konten. Dalam perspektif Dewey, solusi menuntut pemulihan kebiasaan inkuiri

publik melalui pendidikan dan pembentukan komunitas komunikasi yang sehat.

Pembahasan

Ringkasan Hasil

Penelitian yang bertujuan merekonstruksi relasi bahasa, makna, dan tindakan dalam pragmatisme klasik ini menemukan bahwa ketiga tokoh sama-sama menolak makna sebagai entitas mental atau cermin realitas. Temuan ini penting karena memperlihatkan kesatuan dasar pragmatisme di balik perbedaan para tokohnya. Tiga pola dapat ditemukan dari analisis teks. Pertama, Peirce memandang makna sebagai kebiasaan tindakan yang bersifat umum dan diuji oleh komunitas penyelidik. Kedua, James memandang makna sebagai konsekuensi konkret dalam pengalaman individu, dengan ketegangan antara kebenaran sebagai verifikasi dan kebenaran sebagai kebergunaan. Ketiga, Dewey memandang makna sebagai hasil komunikasi dan inkuiri sosial yang menopang kehidupan demokratis. Dari ketiga pola tersebut tampak bahwa pragmatisme bergerak dari dimensi logis-semiotik (Peirce), ke dimensi psikologis-eksistensial (James), hingga dimensi sosial-politis (Dewey), yang bersama-sama melahirkan kriteria normatif bagi makna publik (Gambar 1).

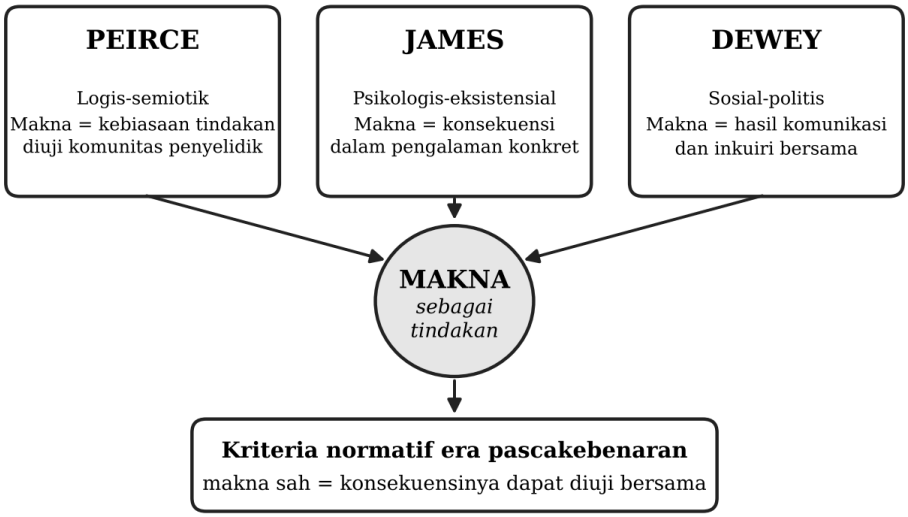

Gambar 1 Model Relasi Makna dan Tindakan dalam Pragmatisme Klasik (diolah oleh penulis)

Eksplanasi

Mengapa pragmatisme mampu menjelaskan krisis pascakebenaran lebih dalam daripada pendekatan yang semata berfokus pada informasi? Jawabannya terletak pada tesis bahwa makna dan keyakinan adalah kebiasaan tindakan, bukan sekadar isi pikiran. Jika keyakinan hanyalah informasi, koreksi fakta seharusnya cukup untuk mengubahnya; kenyataannya, koreksi sering gagal dan bahkan dapat memperkuat keyakinan keliru (Lewandowsky et al., 2017). Peirce menjelaskan kegagalan ini: kebiasaan tidak berubah oleh pernyataan, tetapi oleh pengalaman keraguan nyata yang mendorong inkuiri. James menjelaskan sisi motivasionalnya: keyakinan dipertahankan karena memberi kepuasan psikologis. Dewey menjelaskan sisi strukturalnya: keyakinan dikunci oleh komunitas komunikasi yang tertutup. Hubungan sebab-akibat yang diuji dalam artikel ini terkonfirmasi secara konseptual: semakin makna dilepaskan dari konsekuensi publik yang dapat diuji, semakin besar peluang keyakinan ditetapkan melalui metode keteguhan dan otoritas.

Komparasi dan Kontribusi

Dibandingkan dengan studi terdahulu, temuan artikel ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang memperlihatkan kebaruannya. Persamaannya, artikel ini sejalan dengan Misak (2013) dan Hookway (2000) yang membedakan realisme Peirce dari kecenderungan subjektivis James, serta dengan Talisse (2005) yang menjadikan epistemologi Peirce sebagai dasar demokrasi deliberatif. Artikel ini juga sejalan dengan McIntyre (2018) yang melihat pascakebenaran sebagai krisis sikap terhadap kebenaran, bukan sekadar krisis data. Perbedaannya, kajian-kajian tersebut tidak membandingkan ketiga tokoh klasik secara sistematis dalam konteks disinformasi, dan kajian pascakebenaran jarang memakai teori makna sebagai pisau analisis. Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini merumuskan krisis pascakebenaran sebagai krisis penetapan keyakinan dalam pengertian Peirce. Kedua, artikel ini menunjukkan secara komparatif bahwa tafsir populer atas James rentan terhadap logika pascakebenaran, sedangkan Peirce dan Dewey menawarkan kriteria normatif yang lebih tahan.

Interpretasi

Makna terdalam temuan ini adalah bahwa krisis pascakebenaran merupakan krisis kebudayaan inkuiri, bukan semata kegagalan teknologi atau regulasi. Interpretasi ini muncul ketika hasil penelitian dihubungkan dengan konteks sosial, historis, dan ideologis Indonesia. Secara sosial, masyarakat Indonesia memiliki tradisi komunal yang kuat, sehingga kepercayaan sering mengikuti tokoh dan kelompok, sebuah kondisi yang dekat dengan metode otoritas dalam tipologi Peirce. Secara historis, lompatan cepat ke budaya digital, dengan 229,43 juta pengguna internet pada 2025, terjadi lebih cepat daripada pembentukan kebiasaan verifikasi publik. Secara ideologis, polarisasi politik menjadikan kata-kata seperti "curang" atau "radikal" berfungsi sebagai penanda identitas, bukan klaim yang dapat diuji. Dalam bahasa Dewey, publik Indonesia mengalami "gerhana": memiliki saluran komunikasi yang luas, tetapi kehilangan ruang untuk menguji makna bersama.

Refleksi

Temuan ini memiliki implikasi fungsional dan disfungsional yang perlu direfleksikan. Refleksi ini penting agar pragmatisme tidak diterima sebagai jawaban yang tanpa masalah. Secara fungsional, pragmatisme menawarkan kriteria makna yang operasional: sebuah klaim publik bermakna sejauh konsekuensinya dapat dirumuskan dan diuji bersama. Kriteria ini dapat menjadi dasar literasi digital yang tidak berhenti pada "cek fakta", tetapi melatih kebiasaan bertanya "apa konsekuensi yang dapat diuji dari klaim ini?". Secara disfungsional, pragmatisme mengandung risiko. Tafsir "benar berarti berguna" dapat dipakai untuk membenarkan propaganda yang efektif, sebagaimana dikritik Horkheimer (1947) dalam tuduhannya bahwa pragmatisme mereduksi rasio menjadi alat. Selain itu, cita-cita komunitas penyelidik dan komunikasi Dewey dapat mengabaikan ketimpangan kuasa yang menentukan siapa yang didengar. Oleh karena itu, pragmatisme perlu dibaca bersama teori kritis agar kriteria inkuirinya tidak menjadi alat kelompok dominan.

Implikasi: Rencana Aksi

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan pergeseran kebijakan penanganan hoaks dari pendekatan represif menuju pendekatan inkuiri.

Rekomendasi ini didasari pandangan pragmatis bahwa kebiasaan keyakinan hanya dapat diubah melalui kebiasaan baru, bukan larangan. Pertama, kurikulum literasi digital di sekolah dan perguruan tinggi perlu memasukkan latihan inkuiri ala Dewey: merumuskan masalah, menguji klaim melalui konsekuensinya, dan merevisi keyakinan secara terbuka. Kedua, lembaga pemerintah dan platform digital perlu melengkapi pemblokiran konten dengan transparansi proses verifikasi, sehingga publik belajar cara menguji, bukan hanya menerima hasil. Ketiga, komunitas lokal, seperti organisasi keagamaan dan kampus, dapat difasilitasi menjadi "komunitas penyelidik" yang menguji kabar secara bersama-sama. Keempat, kajian filsafat di perguruan tinggi perlu mengaitkan teori makna dengan persoalan publik. Dengan langkah-langkah ini, pragmatisme dapat berfungsi sebagai filsafat praktis bagi pemulihan ruang publik.

D. Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa makna kata-kata publik hanya dapat bertahan selama ia terus diuji melalui tindakan bersama. Hikmah ini muncul dari temuan bahwa Peirce, James, dan Dewey, dengan caranya masing-masing, mengaitkan makna dengan konsekuensi tindakan. Peirce mengajarkan bahwa keyakinan adalah kebiasaan dan bahwa hanya metode penyelidikan yang terbuka terhadap koreksi yang dapat menetapkan keyakinan secara sehat. James mengingatkan bahwa manusia mempercayai sesuatu juga karena kebutuhan psikologis, sehingga upaya melawan hoaks harus memahami daya tarik emosionalnya. Dewey menunjukkan bahwa makna lahir dari komunikasi, sehingga kesehatan bahasa publik sama dengan kesehatan demokrasi. Dengan demikian, krisis pascakebenaran dapat dipahami sebagai krisis praktik penetapan keyakinan, dan jalan keluarnya adalah pemulihan kebudayaan inkuiri.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusi konseptual dan pendekatannya. Secara konseptual, artikel ini menawarkan rumusan baru bahwa krisis pascakebenaran adalah kemunduran dari metode ilmiah ke metode keteguhan dan otoritas dalam pengertian Peirce, serta gerhana publik dalam pengertian Dewey. Secara pendekatan, artikel ini

menjembatani tiga kecenderungan literatur yang selama ini terpisah: kajian historis pragmatisme, filsafat bahasa kontemporer, dan kajian empiris disinformasi. Artikel ini juga menyumbangkan perbandingan sistematis yang menunjukkan bahwa tidak semua varian pragmatisme sama kuatnya menghadapi logika pascakebenaran. Kriteria Peirce dan Dewey lebih tahan karena menuntut pengujian publik, sedangkan tafsir populer atas James lebih rentan. Pertanyaan baru yang dibuka adalah bagaimana kriteria makna pragmatis dapat dioperasionalkan dalam desain literasi digital dan kebijakan platform.

Keterbatasan kajian ini terletak pada sifatnya yang kepustakaan, sehingga tidak mengukur secara empiris bagaimana kebiasaan keyakinan masyarakat Indonesia terbentuk atau berubah. Data kontekstual tentang hoaks hanya digunakan sebagai ilustrasi fakta sosial, bukan dianalisis secara mendalam per kategori atau per platform. Kajian ini juga membatasi diri pada tiga tokoh pragmatisme klasik dan tidak membahas secara rinci tokoh lain seperti George Herbert Mead atau neopragmatis seperti Rorty dan Brandom. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode campuran untuk menguji hipotesis bahwa latihan inkuiri ala Dewey mengurangi kerentanan terhadap hoaks. Penelitian lain juga dapat membandingkan pragmatisme dengan tradisi epistemologi lokal, seperti konsep *tabayyun* dalam tradisi Islam, untuk merumuskan literasi digital yang berakar pada konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Clarendon Press.

Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi penelitian filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Bernstein, R. J. (2010). *The pragmatic turn*. Cambridge: Polity Press.

Bisnis.com. (2025, 6 Agustus). Data APJII: Pengguna internet di Indonesia tembus 229,43 juta orang pada 2025. Diambil dari https://teknologi.bisnis.com/read/20250806/101/1899997/data-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-22943-juta-orang-pada-2025

Brandom, R. B. (1994). *Making it explicit: Reasoning, representing, and discursive commitment*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

CNBC. (2016, 16 November). "Post-truth" is the word of the year thanks to Brexit, Trump's election campaigns, says Oxford

Dictionaries. Diambil dari https://www.cnbc.com/2016/11/16/post-truth-is-the-word-of-the-year-thanks-to-brexit-trumps-election-campaigns-says-oxford-dictionaries.html

Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York: Macmillan.

Dewey, J. (1925). *Experience and nature*. Chicago: Open Court.

Dewey, J. (1927). *The public and its problems*. New York: Henry Holt.

Dewey, J. (1938). *Logic: The theory of inquiry*. New York: Henry Holt.

Frankfurt, H. G. (2005). *On bullshit*. Princeton: Princeton University Press.

Good News From Indonesia. (2024, 5 Januari). Sampai penghujung 2023, ada 12.547 isu hoaks yang ditangani Kominfo. Diambil dari https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/01/05/sampai-penghujung-2023-ada-12-547-isu-hoaks-yang-ditangani-kominfo

Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Penerj.). Boston: Beacon Press.

Hookway, C. (2000). *Truth, rationality, and pragmatism: Themes from Peirce*. Oxford: Clarendon Press.

Horkheimer, M. (1947). *Eclipse of reason*. New York: Oxford University Press.

James, W. (1896). The will to believe. *The New World, 5*, 327–347.

James, W. (1907). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. New York: Longmans, Green.

James, W. (1909). *The meaning of truth: A sequel to "Pragmatism"*. New York: Longmans, Green.

Kaelan. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the "post-truth" era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6*(4), 353–369.

McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. Cambridge, MA: MIT Press.

Menand, L. (2001). *The metaphysical club: A story of ideas in America*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Misak, C. (2013). *The American pragmatists*. Oxford: Oxford University Press.

Oxford Dictionaries. (2016). *Word of the year 2016*. Oxford Languages.

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. New York: Penguin Press.

Peirce, C. S. (1877). The fixation of belief. *Popular Science Monthly, 12*, 1–15.

Peirce, C. S. (1878). How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly, 12*, 286–302.

Peirce, C. S. (1905). What pragmatism is. *The Monist, 15*(2), 161–181.

Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (Vol. 1–8; C. Hartshorne, P. Weiss,

& A. W. Burks, Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Putnam, H. (1995). *Pragmatism: An open question*. Oxford: Blackwell.

Rorty, R. (1979). *Philosophy and the mirror of nature*. Princeton: Princeton University Press.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.

Talisse, R. B. (2005). *Democracy after liberalism: Pragmatism and deliberative politics*. New York: Routledge.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science, 359*(6380), 1146–1151.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.

Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical investigations* (G. E. M. Anscombe, Penerj.). Oxford: Basil Blackwell.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.